

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PESAWARAN MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2019-2023

Volume 10, 2024

<https://pesawarankab.bps.go.id>

**PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO
KABUPATEN PESAWARAN
MENURUT PENGELUARAN
TAHUN 2019-2023**

Volume 10, 2024

<https://pesawarankab.bps.go.id>

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN PESAWARAN MENURUT PENGELUARAN
2019-2023,
VOLUME 10, 2024**

Katalog : 9302003.1809

Nomor Publikasi : 18090.24003

Ukuran Buku : 21,0 x 29,7 cm

Jumlah Halaman : xiv+72 halaman

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran

Pembuat Kover:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran

Sumber Ilustrasi:

canva.com

Dilarang memproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran.

TIM PENYUSUN

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN PESAWARAN MENURUT PENGELUARAN 2019-2023**
Volume 10, 2024

Pengarah

Ir. Sugiarto

Penanggung Jawab

Rizqa Fithriani, S.ST., M.Si.

Penyunting

Nurdiansyah, S.ST.

Penulis Naskah

Aisyah Salsabila, S.Tr. Stat.

Pengolah Data

Aisyah Salsabila, S.Tr.Stat.

Penata Letak dan Desain

Aisyah Salsabila, S.Tr.Stat.

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan. Penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran (PDRB menurut Pengeluaran /*expenditure*), serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori, serta Ekspor Netto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya. Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Gedong Tataan, April 2024
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Pesawaran,



Sugiarto

DAFTAR ISI

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PESAWARAN MENURUT PENGELUARAN 2019-2023 VOLUME 10, 2024

KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI.....	VII
DAFTAR TABEL	IX
DAFTAR GAMBAR.....	XI
DAFTAR LAMPIRAN	XIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	3
1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB	4
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	7
2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	9
2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NONPROFIT MELAYANI RUTA.....	12
2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	15
2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	17
2.5 PERUBAHAN INVENTORI.....	21
2.6 EKSPOR DAN IMPORT	24
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN PESAWARAN BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN 2019-2023	29
3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB PESAWARAN MENURUT PENGELUARAN	31
3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	37
3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT	39
3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH.....	40
3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	42
3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI	43
3.7 PERKEMBANGAN NET EKSPOR	44

BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KABUPATEN PESAWARAN	
2019-2023	47
4.1 PDRB (NOMINAL)	49
4.2 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB.....	50
4.3 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB	50
4.4 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR).....	51
BAB V KESIMPULAN	55
LAMPIRAN	59
DAFTAR PUSTAKA	69

<https://pesawarankab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Pesawaran 2019-2023.....	32
Tabel 2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Pesawaran 2019-2023.....	33
Tabel 3.	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Pesawaran 2019-2023.....	35
Tabel 4.	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Pesawaran 2019-2023.....	35
Tabel 5.	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Pesawaran 2019-2023.....	36
Tabel 6.	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Pesawaran 2019-2023.....	37
Tabel 7.	Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Pesawaran 2019-2023.....	39
Tabel 8.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Pesawaran 2019- 2023.....	41
Tabel 9.	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Pesawaran 2019-2023.....	42
Tabel 10.	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Pesawaran 2019-2023.....	44
Tabel 11.	Perkembangan Net Ekspor Kabupaten Pesawaran 2019-2023.....	45
Tabel 12.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Pesawaran 2019-2023.....	49
Tabel 13.	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Kabupaten Pesawaran 2019-2023.....	50
Tabel 14.	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Pesawaran 2019-2023.....	51
Tabel 15.	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> Kabupaten Pesawaran 2019-2023.....	52

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran dan Pertumbuhan Implisit Kabupaten Pesawaran 2019-2023..... 32
- Gambar 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Pesawaran 2019-2023 33
- Gambar 3. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Pesawaran 2019-2023..... 34

<https://pesawarankab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesawaran Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2019- 2023.....	61
Lampiran 2.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesawaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2019- 2023	62
Lampiran 3.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesawaran Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen), 2019–2023	63
Lampiran 4.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesawaran Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (persen), 2019–2023	64
Lampiran 5.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesawaran Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen), 2019–2023	65
Lampiran 6.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesawaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (persen), 2019–2023	66
Lampiran 7.	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesawaran Menurut Pengeluaran (2010=100), 2019–2023	67
Lampiran 8.	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesawaran Menurut Pengeluaran (persen), 2019–2023	68

PENDAHULUAN

” PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu.

Tiga Pendekatan Penghitungan PDRB

- PDRB menurut Lapangan Usaha
- PDRB menurut Pengeluaran 
- PDRB menurut Pendapatan

1



1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan, PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan dapat mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 2. Pertambangan dan Penggalian; 3. Industri Pengolahan; 4. Pengadaan Listrik dan Gas; 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 6. Konstruksi; 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 8. Transportasi dan Pergudangan; 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 10. Informasi dan Komunikasi; 11. Jasa Keuangan dan Asuransi; 12. Real Estat; 13. Jasa Perusahaan; 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 15. Jasa Pendidikan; 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

Pengertian PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB menurut pendekatan pengeluaran merupakan semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga; (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga; (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah; (4) pembentukan modal tetap domestik bruto; (5) perubahan inventori; dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan akan sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

<https://pesawarankab.bps.go.id>

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

Metode estimasi dan sumber data menyesuaikan dengan komponen PDRB menurut Pengeluaran. Komponen tersebut diantaranya:

- ✓ KONSUMSI RUMAH TANGGA
- ✓ KONSUMSI LNPRT
- ✓ KONSUMSI PEMERINTAH
- ✓ PMTB
- ✓ PERUBAHAN INVENTORI
- ✓ NET EKSPOR

2



2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

2.1.1 Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran¹. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

2.1.2 Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

2.1.3 Cakupan

PKRT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan

¹ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumah tangganya relatif lebih rendah

11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga juga mencakup juga hal-hal berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*); Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor).

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi

rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.

- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

2.1.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2.1.5 Penghitungan PKRT Tahunan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010. Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sebagai berikut:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun

2. Terhadap data poin ke-1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
3. Data poin ke-2 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP;
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;
6. PKRT ADH Konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin keempat (4) dengan hasil poin kelima (5).

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NONPROFIT MELAYANI RUTA

2.2.1 Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

2.2.2 Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumah tangga. Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus;

- Istilah nonprofit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/ olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

2.2.3 Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

2.2.4 Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-LNPRT bersumber dari:

- a. Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP)
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- b. Hasil *up-dating* direktori LNPRT
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- c. Indeks Harga Konsumen (IHK)

2.2.5 Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

PK-LNPRT diestimasi dengan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut:

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku.
- Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT ADH Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

2.3.1 Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

2.3.2 Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan

yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditas (pendapatan jasa).

2.3.3 Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Kabupaten mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota; b. PK-Pemerintah Provinsi yang merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten; d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Kabupaten bersangkutan.

2.3.4 Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (BPKAD)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2.3.5 Penghitungan PK-P Tahunan

a) PK-P Kabupaten/Kota ADH Berlaku

Secara umum, PK-P ADH Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PK-P atas dasar harga Berlaku} = \text{Output non-pasar} - \text{Penjualan barang dan jasa} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non-pasar dihitung melalui pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu: Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Kabupaten, PK-P Kabupaten ADH Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi yang menjadi bagian dari Kabupaten yang bersangkutan + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Kabupaten/Kota + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Kabupaten yang bersangkutan.

b) PK-P Kabupaten/Kota ADH Berlaku

Sementara itu, pengeluaran konsumsi pemerintah ADH Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Regional Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

2.4.1 Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

2.4.2 Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup

pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah “bruto” mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

2.4.3 Cakupan

PMTB terdiri dari:

- Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagai-nya;
- Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

2.4.4 Sumber Data

- Output kategori konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut Lapangan Usaha BPS Kabupaten
- Laporan keuangan perusahaan
- IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar
- Hasil survei Matriks PMTB
- Hasil survei Keuangan Pemerintah Kabupaten
- Hasil Survei (*raw data*) Industri Besar Sedang (IBS)

2.4.5 Penghitungan PMTB Tahunan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

a) Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB ADH Konstan, maka PMTB ADH Berlaku tersebut di-deflate (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

b) Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output kategori konstruksi, hasil PDRB, baik ADH Berlaku maupun ADH Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari

impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan 2 cara. Pertama, dengan mengalokasikan output mesin, alat angkut dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB ADH Berlaku. Untuk memperoleh nilai ADH Konstan adalah dengan men-deflate PMTB (ADH Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal. Pendekatan kedua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara ekstrapolasi atau mengalikan PMTB ADH Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB ADH Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB ADH Berlaku, nilai PMTB ADH Konstan tersebut di-reflate (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB ADH Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkut dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 cara. Pertama, PMTB ADH Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkut dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). Kedua, untuk memperoleh PMTB ADH Konstan adalah dengan cara men-deflate PMTB ADH Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB ADH Berlaku untuk barang modal tak berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan ADH Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB ADH Konstan-nya diperoleh dengan men-deflate nilai ADH Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB ADH Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk ADH Konstan diperoleh dengan men-deflate nilai ADH Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film.

PMTB ADH Konstan-nya diperoleh dengan cara mendeflate nilai ADH Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

2.5.1 Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

2.5.2 Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

2.5.3 Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sebagai berikut:

- Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- Ternak untuk tujuan dipotong;
- Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

2.5.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori yaitu:

- a. Hasil survei IBS Tahunan
- b. Data komoditas perkebunan;
- c. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- d. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.

2.5.5 Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi korporasi, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi komoditas.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

a) Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut.

- menghitung posisi inventori ADH Konstan, dengan cara mendeflate stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori ADH Konstan dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori ADH Berlaku dengan menginflate perubahan inventori ADH Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

b) Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori ADH Berlaku diperoleh dengan

cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori ADH Konstan dihitung dengan *deflate* nilai perubahan inventori ADH Berlaku dengan indeks harga yang sesuai atau dengan mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6 EKSPOR DAN IMPORT

2.6.1 Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

2.6.2 Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

2.6.3 Cakupan

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari kabupaten tersebut;
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari kabupaten tersebut. Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya;
- c. Net Ekspor antar daerah, yang mencakup ekspor antar daerah dan Impor antar daerah.

2.6.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penghitungan ekspor-impor tahunan, adalah:

- a. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan.
- b. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- c. Informasi lalu-lintas barang yang keluar masuk provinsi dari hasil survei.

Data yang tersedia tersebut digunakan sebagai pendukung hasil penghitungan dengan metode tak-langsung, ditambah dengan informasi dari hasil Survei Matriks Arus Komoditas (SMAK) yang menggali informasi tentang ekspor-impor antar kabupaten/kota secara sampel. Data yang digunakan dalam metode tak-langsung adalah:

- Struktur input;
- Struktur permintaan akhir menurut komoditas;
- Nilai tambah bruto ADH Berlaku;
- Koefisien heterogenitas; dan
- IHPB barang dan IHK jasa-jasa (kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olah raga; transpor dan komunikasi, serta jasa keuangan).

2.6.5 Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

Metode penghitungan ekspor-impor kabupaten/kota terdiri dari penghitungan untuk data tahunan ADH Berlaku dan ADH Konstan.

a) Penghitungan Ekspor/Impor ADH Berlaku

Penghitungan ekspor-impor kabupaten/kota dengan metode tak langsung menggunakan metode *cross hauling*. Metode ini akan menghasilkan nilai ekspor-impor barang dan jasa di suatu kabupaten/kota. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap industri/komoditas di suatu perekonomian.

Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) untuk menuju kondisi *demand* dan *supply* yang seimbang di suatu perekonomian. Jika *supply* domestik suatu industri/komoditas di suatu kabupaten/kota melebihi kebutuhan (permintaan antara dan permintaan akhir), maka kabupaten/kota tersebut mengalami surplus dan akan melakukan ekspor. Sebaliknya, jika *supply* domestik komoditas di suatu kabupaten/kota tidak ada atau kurang, maka kabupaten/kota tersebut akan mengimpor (Kronenberg, 2008).

Asumsi yang digunakan dalam metode *commodity balance* adalah kelebihan dan kekurangan *supply* domestik atas *demand*, sepenuhnya diselesaikan dengan ekspor dan impor. Jika kelebihan *supply* domestik, maka akan melakukan ekspor, sedangkan jika kekurangan *supply* domestik, maka akan mengimpor. Hal ini membuat penghitungan ekspor-impor tersebut belum menangkap aspek lain di dalam transaksi ekspor-impor, karena dalam kenyataannya, baik dalam kondisi kelebihan atau kekurangan *supply* domestik, suatu kabupaten/kota dapat melakukan transaksi ekspor/impor secara bersama. Untuk mengatasi kelemahan ini, penghitungan ekspor-impor kabupaten/kota perlu untuk disempurnakan dengan menerapkan metode *cross hauling*.

Metode *cross hauling* berusaha mengatasi kelemahan metode *commodity balance*, dengan mengakomodir kemungkinan suatu kabupaten/kota melakukan ekspor-impor komoditas secara bersamaan. Contoh, suatu kabupaten/kota, selain mengekspor komoditas pertanian ke luar daerah/luar negeri, juga melakukan impor komoditas pertanian yang merupakan output dari luar daerah/luar negeri.

Penghitungan ekspor-impor kabupaten/kota menggunakan metode *commodity balance* dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menyusun struktur input masing-masing industri dengan bantuan Tabel I-O yang tersedia;
2. Mengalikan NTB menurut industri dengan rasio total input/output terhadap NTB;
3. Mengalikan struktur input pada dari poin (1) dengan output dari poin (2). Dari proses ini dihasilkan biaya antara, NTB, dan total input/output dalam Tabel I-O bayangan;
4. Menyusun struktur komponen permintaan akhir dengan bantuan Tabel I-O yang ada;
5. Mengalikan masing-masing komponen permintaan akhir dengan struktur dari poin (4);
6. Menghitung nilai ekspor neto (*trade balance*), yang merupakan selisih output (*supply domestik*) dengan permintaan domestik (antara dan akhir domestik);
7. Jika net ekspor bernilai positif, diasumsikan terjadi ekspor, dan jika bernilai negatif diasumsikan terjadi impor;
8. Menjumlahkan nilai ekspor dan impor komoditas dari poin (7) untuk mendapat nilai ekspor dan impor.

Selanjutnya, untuk menghitung ekspor-impor kabupaten/kota dengan metode *cross hauling*, dilakukan langkah seperti langkah yang dilakukan dalam metode *commodity balance* di atas, namun hanya sampai langkah ke (6). Penyesuaian dilakukan untuk langkah ke (7), sehingga urutannya menjadi:

1. Melakukan langkah (1) s.d (6) seperti pada metode *commodity balance*;
2. Menghitung koefisien heterogenitas berdasarkan tabel I-O data yang tersedia, yaitu *trade volume* dikurangi nilai absolut *trade balance*. Hasilnya dibagi dengan jumlah output, permintaan antara, dan permintaan akhir domestik;
3. Menghitung besarnya volume perdagangan (*trade volume*), yaitu menjumlahkan nilai absolut *trade balance* dengan hasil perkalian antara koefisien heterogenitas dan jumlah output, permintaan antara, dan permintaan akhir domestik;
4. Nilai impor setiap komoditas diperoleh dengan mengurangi *trade volume* dengan *trade balance*, hasilnya dibagi dua;
5. Nilai ekspor setiap komoditas diperoleh dengan menjumlahkan *trade balance* dan impor;
6. Menjumlahkan nilai ekspor dan impor per komoditas pada langkah (5) untuk mendapat nilai ekspor dan impor.

b) Penghitungan ADH Konstan

Penghitungan ekspor-impor antar kabupaten/kota adh konstan dilakukan dengan metode deflasi, dengan IHPB dan IHK sebagai deflatornya. Deflator untuk barang adalah IHPB, sedangkan jasa adalah IHK.

<https://pesawarankab.bps.go.id>

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN PESAWARAN BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2019-2023

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Konsumsi Pemerintah | 5,67%

Konsumsi LNPRT | 1,40%

PMTB | 30,45%

Perubahan Inventori | 0,16%

Net Ekspor | 3,07%



Pengeluaran
Konsusmsi
Rumah Tangga | **59,25%**

Pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen dengan distribusi terbesar dalam PDRB Pengeluaran

3



3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB PESAWARAN MENURUT PENGELUARAN

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Pesawaran akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2019 sampai dengan 2023, tidak terlepas dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal, banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Secara total, PDRB Kabupaten Pesawaran Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 8,69 persen dibandingkan dengan tahun 2022, yakni dari 18.601 Miliar Rupiah di tahun 2022 menjadi 20.217 Miliar Rupiah pada tahun 2023. Jika dinilai atas dasar harga konstan 2010, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami kenaikan, yakni dari 12.016 Miliar Rupiah menjadi 12.556 miliar Rupiah, atau sebesar 4,49 persen.

Pada periode Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran tumbuh 5,00 persen. Pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Pesawaran berkontraksi hingga mencapai 1,26 persen disebabkan adanya pandemi yang terjadi secara global. Pada tahun 2021, aktivitas ekonomi masyarakat mulai pulih, hal ini mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 2,08 persen. Pada Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran semakin membaik dan mengalami pertumbuhan hingga mencapai 4,55 persen. Sedangkan, di Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran sedikit mengalami perlambatan hingga mencapai 4,49 persen.

Pada periode tahun 2019-2023, PDRB Kabupaten Pesawaran atas dasar harga berlaku selalu mengalami peningkatan, nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada masing-masing tahun yaitu sebesar 16.208,21 Miliar Rupiah; 16.211,74 Miliar Rupiah; 16.814,58 Miliar Rupiah; 18.601,24 Miliar Rupiah; dan 20.217,38 Miliar Rupiah. Peningkatan ini dipengaruhi oleh perubahan harga maupun perubahan volume produk domestik. Peningkatan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut komponen pengeluaran Kabupaten Pesawaran pada periode 2019-2023 dapat dilihat dari Tabel 1 dan Gambar 1 berikut ini:

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Pesawaran, 2019-2023

(Miliar Rp)

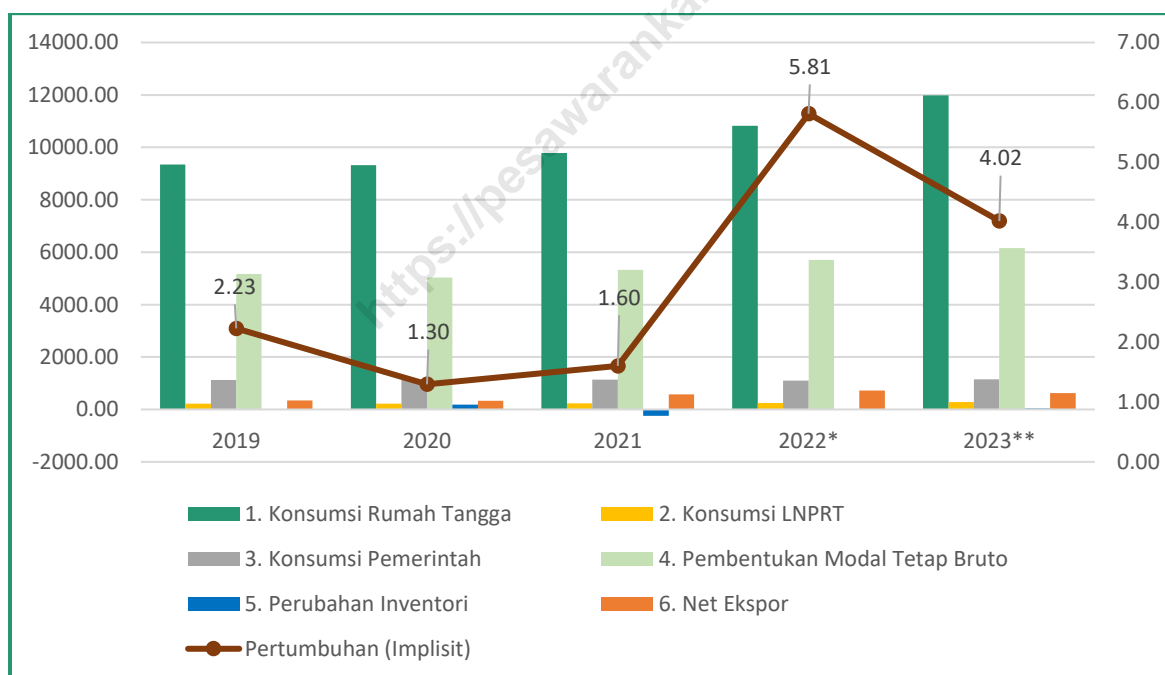
Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	9.349,29	9.325,11	9.780,52	10.816,88	11.978,48
2. Konsumsi LNPRT	220,37	225,11	234,90	250,07	282,85
3. Konsumsi Pemerintah	1.125,38	1.119,81	1.141,64	1.103,13	1.146,73
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.167,52	5.029,77	5.324,66	5.702,62	6.156,14
5. Perubahan Inventori	2,07	182,34	(245,34)	5,49	31,87
6. Net Ekspor	343,57	329,60	578,21	723,05	621,30
PDRB	16.208,21	16.211,74	16.814,58	18.601,24	20.217,38

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Gambar 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Pertumbuhan Implisit Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran 2019-2023



Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dievaluasi dengan harga Tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau

kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil terutama terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Pesawaran pada periode 2019-2023 dapat dilihat dari Tabel 2 dan Gambar 2 berikut ini.

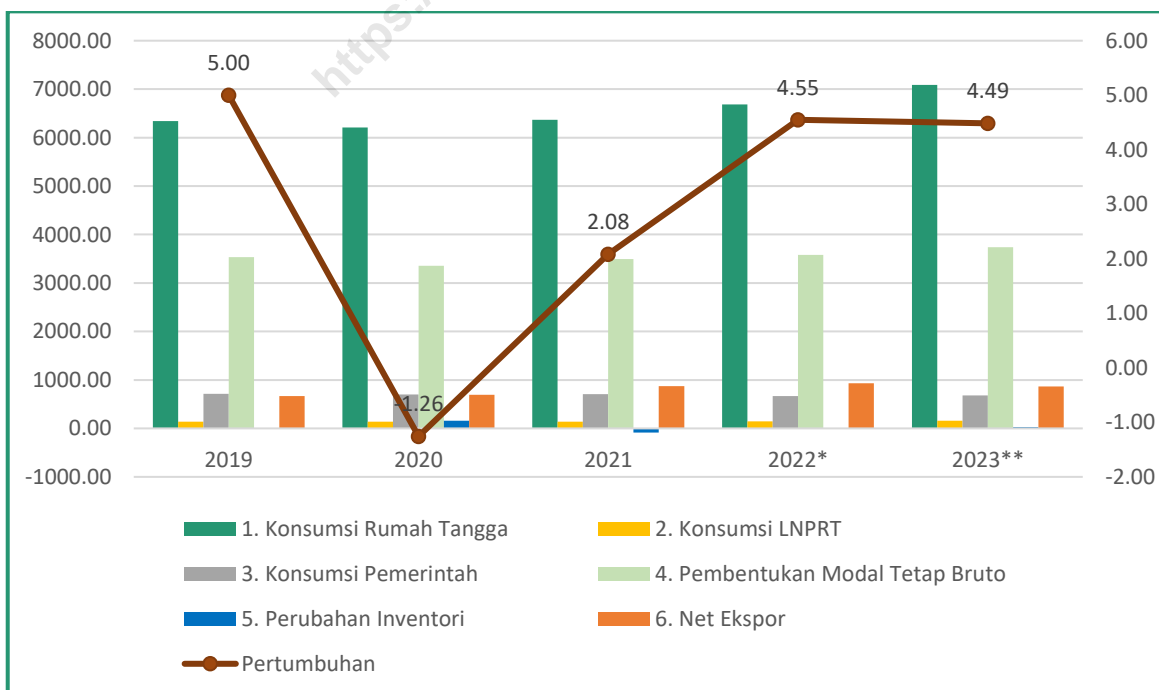
Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran 2019-2023

Komponen Pengeluaran	(Miliar Rp)				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	6.342,86	6.211,34	6.368,15	6.683,80	7.088,30
2. Konsumsi LNPRT	136,92	137,47	140,27	143,22	156,41
3. Konsumsi Pemerintah	716,08	698,71	704,98	669,68	678,73
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.534,27	3.354,08	3.494,79	3.582,54	3.740,39
5. Perubahan Inventori	1,76	160,33	(85,17)	3,60	23,76
6. Net Ekspor	670,20	696,85	870,28	933,51	867,99
PDRB	11.402,09	11.258,77	11.493,29	12.016,35	12.555,57

Keterangan:

- * : Angka Sementara
- ** : Angka Sangat Sementara

Gambar 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK, Kabupaten Pesawaran 2019-2023



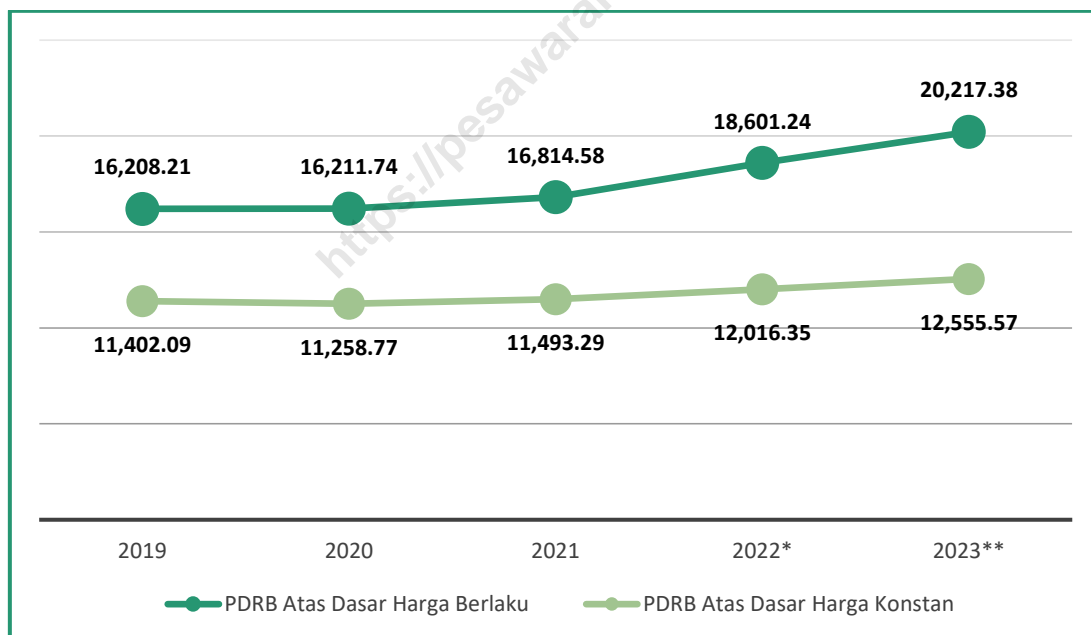
Keterangan:

- * : Angka Sementara
- ** : Angka Sangat Sementara

Dari Tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Pesawaran pada periode Tahun 2019-2023 selalu mengalami peningkatan, kecuali pada Tahun 2020. Pada Tahun 2020, nilai PDRB Kabupaten Pesawaran sebesar Rp11.258,77 Miliar mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yang mencapai Rp11.402,09 Miliar.

Pada Gambar 2 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2020 mengalami kontraksi hingga 1,26 persen dibandingkan pertumbuhan ekonomi Tahun 2019 yang telah mencapai 5,00 persen. Pada Tahun 2021, perekonomian Kabupaten Pesawaran mengalami pertumbuhan sebesar 2,08 persen, kemudian meningkat kembali di tahun 2022 hingga pertumbuhan ekonomi mencapai 4,55 persen. Pada periode Tahun 2021 dan Tahun 2022, aktivitas ekonomi masyarakat mulai pulih dari Pandemi Covid-19, hal ini mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, pada Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan mencapai 4,49 persen.

Gambar 3. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Pesawaran 2019-2023



Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Dari Gambar 3 di atas, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan, pengaruh dari harga tersebut telah diabaikan. Sama halnya dengan PDRB

atas dasar harga berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan kecuali pada Tahun 2020 yang mengalami kontraksi akibat adanya Pandemi Covid-19.

Tabel 3. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran 2019-2023

Komponen Pengeluaran	(persen)				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	57,68	57,52	58,17	58,15	59,25
2. Konsumsi LNPRT	1,36	1,39	1,40	1,34	1,40
3. Konsumsi Pemerintah	6,94	6,91	6,79	5,93	5,67
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,88	31,03	31,67	30,66	30,45
5. Perubahan Inventori	0,01	1,12	(1,46)	0,03	0,16
6. Net Ekspor	2,12	2,03	3,44	3,89	3,07
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari Tabel 4, PDRB Kabupaten Pesawaran periode Tahun 2019-2023 cenderung fluktuatif.

Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran 2019-2023

Komponen Pengeluaran	(persen)				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,04	(2,07)	2,52	4,96	6,05
2. Konsumsi LNPRT	9,29	0,40	2,04	2,11	9,20
3. Konsumsi Pemerintah	2,97	(2,43)	0,90	(5,01)	1,35
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,70	(5,10)	4,20	2,51	4,41
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	5,00	(1,26)	2,08	4,55	4,49

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Setelah mengalami kontraksi ekonomi di Tahun 2020, perekonomian di Kabupaten Pesawaran menunjukkan pemulihan di Tahun 2021 dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat menjadi 2,08 persen. Lalu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran mengalami kenaikan pada Tahun 2022 mencapai 4,55 persen dan di Tahun 2023 sedikit mengalami perlambatan menjadi 4,49 persen. Adapun pertumbuhan masing-masing komponen PDRB pada periode tahun yang sama disajikan pada Gambar 5.

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	147,40	150,13	153,58	161,84	168,99
2. Konsumsi LNPRT	160,96	163,75	167,46	174,60	180,85
3. Konsumsi Pemerintah	157,16	160,27	161,94	164,73	168,95
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	146,21	149,96	152,36	159,18	164,59
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	142,15	143,99	146,30	154,80	161,02

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Indeks implisit² PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen akhir barang dan jasa (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan), baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari Tabel 5 terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2019-2023, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

² Indeks perkembangan

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menepati porsi terbesar dalam PDRB menurut Pengeluaran. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Tabel 6 di bawah ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu Tahun 2019–2023, total konsumsi akhir rumah tangga salalu mengalami peningkatan, kecuali pada Tahun 2020. Peningkatan ini terjadi baik dari sisi nominal (ADH Berlaku) maupun sisi riil (ADH Konstan). Peningkatan ini juga sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 6. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Pesawaran, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	9.349,29	9.325,11	9.780,52	10.816,88	11.978,48
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	6.342,86	6.211,34	6.368,15	6.683,80	7.088,30
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	57,68	57,52	58,17	58,15	59,25
Rata-Rata Konsumsi Per Kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	21.015,73	19.584,32	20.288,80	22.156,97	24.234,35
b. ADHK 2010	14.257,76	13.044,87	13.210,14	13.690,89	14.340,73
Pertumbuhan					
a. Total Konsumsi RT	4,04	-2,07	2,52	4,96	6,05
b. Per Kapita	2,94	-8,51	1,27	3,64	4,75
Jumlah penduduk (000 orang)	444,87	476,15	482,07	488,19	494,28

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Proporsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB pada periode Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Titik terendah terjadi pada Tahun 2020 yang hanya mencapai 57,52 persen. Hal ini dikarenakan sedang terjadi Pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian dari sisi produksi tidak berjalan optimal dan permintaan yang

menurun. Sedangkan, pada periode Tahun 2021-2023 perekonomian mulai membaik, sehingga pola dan perilaku konsumsi rumah tangga kembali ke pola awal. Sementara, proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB relatif terus mengalami peningkatan hingga di Tahun 2023 hingga mencapai 59,25 persen.

Secara umum, rata-rata konsumsi per kapita dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, baik menurut ADH Berlaku maupun ADH Konstan. Jika dilihat dari sisi ADH Berlaku, pada tahun 2019, setiap orang di Kabupaten Pesawaran menghabiskan dana sekitar 21,02 juta rupiah dalam setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut menurun menjadi 19,58 juta rupiah pada tahun 2020, kemudian pengeluaran tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023 berturut-turut sebesar 20,29 juta rupiah; 22,16 juta rupiah; dan 24,23 juta rupiah.

Sementara itu, jika dilihat dari sisi ADH Konstan, total konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 4,04 persen pada tahun 2019 dan terus befluktuasi. Pada tahun 2020, pertumbuhan total konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen. Dan kembali berangsur meningkat menjadi 2,52 persen (2021); 4,96 persen (2022); dan 6,05 persen (2023). Demikian pula dengan pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita. Ditemukan pola yang sama antara pertumbuhan total konsumsi rumah tangga dengan pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita.

Rata-rata konsumsi per kapita mengalami pertumbuhan 2,94 persen pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020, pertumbuhan rata-rata konsumsi perkapita mengalami kontraksi hingga mencapai 8,51 persen. Ketidakstabilan kondisi perekonomian akibat Pandemi Covid-19 sangat dirasakan oleh setiap orang dalam suatu rumah tangga sehingga konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama perekonomian melambat secara signifikan hingga terjadi kontraksi. Seiring dengan mulai pulihnya perekonomian di tahun 2021 hingga 2023, rata-rata konsumsi per kapita terus mengalami pertumbuhan yang positif dari tahun 2022 mencapai 1,27 persen hingga pada tahun 2023 mencapai 4,75 persen. Kondisi di tahun 2021-2023 menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Pesawaran meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan ini secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) merupakan salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Total pengeluaran konsumsi LNPRT pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2019, konsumsi LNPRT atas dasar harga berlaku sebesar 220,37 miliar rupiah dan terus meningkat sampai dengan tahun 2023 hingga mencapai 282,85 miliar rupiah. Konsumsi LNPRT atas dasar harga konstan pada Tahun 2019 sebesar 136,92 miliar Rupiah dan terus meningkat sampai dengan tahun 2023 hingga mencapai 156,41 miliar Rupiah. Nilai Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT dengan tahun dasar 2010 cenderung berfluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 9,29 persen, sedangkan perlambatan pertumbuhan terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,40 persen.

Tabel 7. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Pesawaran 2019 - 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	220,37	225,11	234,90	250,07	282,85
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	136,92	137,47	140,27	143,22	156,41
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,36	1,39	1,40	1,34	1,40
Pertumbuhan (ADHK 2010)	9,29	0,40	2,04	2,11	9,20

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Sementara, jika dilihat dari kontribusi terhadap PDRB, kontribusi pengeluaran konsumsi LNPRT relatif stagnan dari tahun ke tahun. Kontribusi tersebut berkisar di bawah 1,5 persen. Selama kurun waktu 2019-2023, kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2021

dan 2023, yaitu sebesar 1,40 persen. Tingginya kontribusi LNPRT terutama pada tahun 2023 disebabkan banyaknya aktivitas politik menjelang Pemilu Tahun 2024.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah; b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga); c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sementara itu, barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut; b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Secara rata-rata, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah pada periode 2019-2023 cukup berfluktuatif, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Jika dilihat berdasarkan harga berlaku, pengeluaran komponen konsumsi akhir pemerintah berkisar antara 1103,13 milyar rupiah (Tahun 2022) hingga 1146,73 milyar rupiah (Tahun 2023). Apabila konsumsi akhir pemerintah ditinjau berdasarkan harga konstan 2010, nilai konsumsi pemerintah berkisar antara 669,68 miliar rupiah (Tahun 2022) hingga 716,08 miliar rupiah (Tahun 2019). Jika dicermati lebih lanjut, proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB cenderung mengalami penurunan. Pada periode tahun 2019-2023, proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB berturut-turut adalah 6,94 persen; 6,91 persen; 6,79 persen; 5,93 persen; dan 5,67 persen.

Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Pesawaran 2019- 2023

U r a i a n	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	1.125,38	1.119,81	1.141,64	1.103,13	1.146,73
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	716,08	698,71	704,98	669,68	678,73
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	6,94	6,91	6,79	5,93	5,67
Konsumsi Pemerintah per- Kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	2.529,68	2.351,79	2.368,22	2.259,63	2.320,02
b. ADHK 2010	1.609,63	1.467,41	1.462,41	1.371,75	1.373,17
Pertumbuhan					
a. Total konsumsi Pemerintah	2,97	(2,43)	0,90	-5,01	1,35
b. Konsumsi Pemerintah Per Kapita	1,89	(8,84)	-0,34	-6,20	0,10
Jumlah penduduk (000 orang)	444,87	476,15	482,07	488,19	494,28

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2019, konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga berlaku sebesar 2,53 juta Rupiah, kemudian mengalami penurunan di tahun 2020 hingga mencapai 2,35 juta rupiah. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan sehingga rata-rata konsumsi pemerintah per kapita menjadi 2,37 juta rupiah, kemudian di tahun 2022 mengalami penurunan hingga mencapai 2,26 juta rupiah. Pada tahun 2023, rata-rata konsumsi pemerintah per kapita mengalami peningkatan kembali hingga mencapai nilai 2,32 juta rupiah.

Pertumbuhan total konsumsi pemerintah tertinggi berada pada tahun 2019 yaitu sebesar 2,97 persen dengan pertumbuhan konsumsi perkapita sebesar 1,89 persen. Pada Tahun 2020 dan 2022, pertumbuhan total konsumsi pemerintah mengalami kontraksi yaitu

masing-masing sebesar 2,43 persen dan 5,01 persen. Adanya kontraksi pertumbuhan pada konsumsi pemerintah di tahun 2020 merupakan dampak adanya Pandemi Covid-19, sedangkan di tahun 2022 merupakan dampak dari realisasi belanja daerah yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2021, pemulihan ekonomi mendorong peningkatan pertumbuhan konsumsi pemerintah menjadi 0,9 persen, namun untuk pertumbuhan konsumsi pemerintah per kapita masih mengalami kontraksi sebesar 0,34 persen. Sementara itu, di tahun 2023 pertumbuhan konsumsi pemerintah mengalami peningkatan yang positif, baik dari total konsumsi pemerintah (1,35 persen) maupun konsumsi pemerintah per kapita (0,10 persen).

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda, dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)³. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Tabel 9. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Pesawaran 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	5.167,52	5.029,77	5.324,66	5.702,62	6.156,14
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	3.534,27	3.354,08	3.494,79	3.582,54	3.740,39
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	31,88	31,03	31,67	30,66	30,45
Pertumbuhan (ADHK 2010)	5,70	-5,10	4,20	2,51	4,41

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

³ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

Data di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2019-2023 cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan sebesar 5,70 persen, kemudian pada tahun 2020, pertumbuhan untuk pengeluaran pada komponen ini mengalami kontraksi hingga mencapai 5,10 persen. Pada tahun 2021, aktivitas ekonomi mengalami pemulihan sehingga pengeluaran untuk komponen PMTB mengalami pertumbuhan sebesar 4,02 persen, kemudian kembali tumbuh walaupun dengan perlambatan pada tahun 2022 mencapai 2,51 persen dan terus naik pada tahun 2023 hingga mencapai 4,41 persen.

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis lebih rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

Tabel 10. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Pesawaran 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	2,07	182,34	(245,34)	5,49	31,87
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1,76	160,33	(85,17)	3,60	23,76

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2019 dan 2020, perubahan inventori atas dasar harga berlaku ataupun atas harga konstan mengalami penambahan di setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2021 perubahan inventori mengalami penurunan hingga perubahan inventori bertanda negatif.

3.7 PERKEMBANGAN NET EKSPOR

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Pesawaran, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Pesawaran di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Pesawaran terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri.

Tabel 11. Perkembangan Net Ekspor Kabupaten Pesawaran 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Net Ekspor					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	2.280,60	2.215,65	2.650,23	2.757,55	2.758,88
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	1.610,40	1.518,81	1.779,95	1.824,04	1.890,89
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	2,12	2,03	3,44	3,89	3,07

Keterangan:

* : Angka Sementara

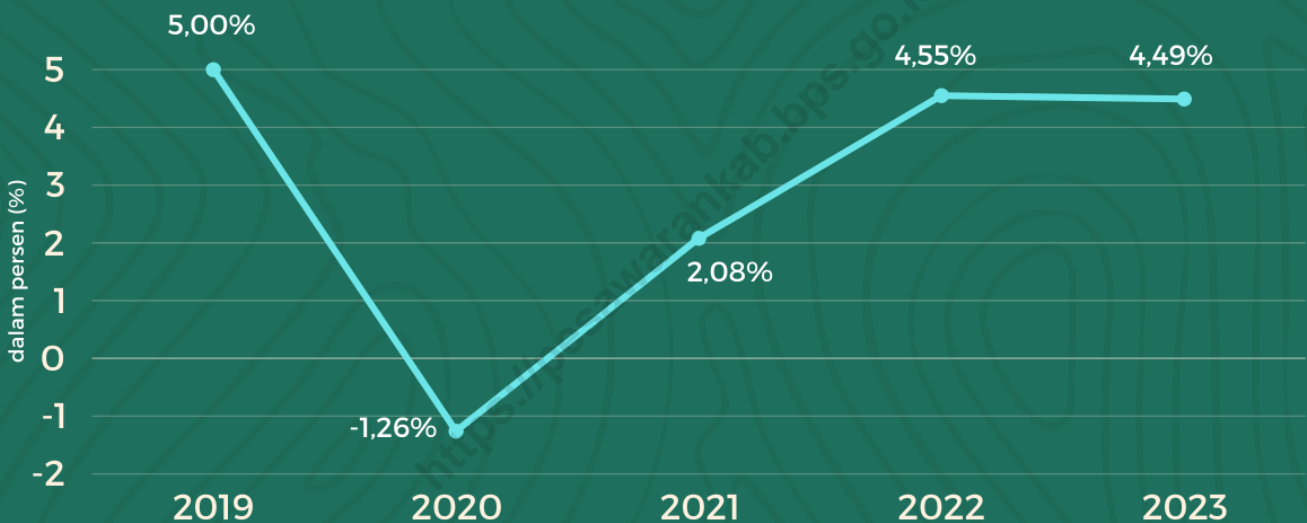
** : Angka Sangat Sementara

Net ekspor yang merupakan selisih antara nilai ekspor dan impor menggambarkan kinerja perdagangan luar daerah Kabupaten Pesawaran. Secara total, dalam kurun waktu 2019-2023 nilai net ekspor barang dan jasa menunjukkan nilai positif setiap tahun. Hal tersebut berarti lebih banyak produk yang di ekspor ke luar Kabupaten Pesawaran dibandingkan produk yang di impor masuk. Atau dengan kata lain selama lima tahun terakhir Kabupaten Pesawaran mengalami surplus perdagangan luar kabupaten. Pada tahun 2019, nilai net ekspor barang dan jasa sebesar 343,57 miliar Rupiah, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga mencapai 329,60 miliar Rupiah. Pada tahun 2021 hingga tahun 2022 kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 578,21 miliar Rupiah dan 723,05 miliar rupiah. Sementara pada tahun 2023, net ekspor di Kabupaten Pesawaran mengalami penurunan hingga mencapai 621,30 miliar rupiah.

Meskipun surplus perdagangan ke luar daerah Kabupaten Pesawaran mencatatkan kinerja yang positif selama lima tahun terakhir, namun kontribusi surplus perdagangan tersebut terhadap PDRB masih di bawah lima persen. Dalam kurun waktu 2019-2023 net ekspor barang dan jasa menyumbang pembentukan PDRB Kabupaten Pesawaran pada kisaran 2,03 s.d. 3,89 persen.

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KABUPATEN PESAWARAN 2019-2023

Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2023



Pertumbuhan PDRB perlahan menunjukkan peningkatan walau mengalami perlambatan di Tahun 2023 dan terjadi kontraksi pada Tahun 2020

4



Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Pesawaran di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran, dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita.

Tabel 12. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Pesawaran 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	16.208,21	16.211,74	16.814,58	18.601,24	20.217,38
- ADHK 2010	11.402,09	11.258,77	11.493,29	12.016,35	12.555,57
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	36.433,51	34.047,40	34.880,32	38.102,22	40.902,94
- ADHK 2010	25.630,11	23.645,33	23.841,79	24.613,94	25.401,90
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010	5,00	(1,26)	2,08	4,55	4,49
Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK 2010	3,90	(7,74)	0,83	3,24	3,20
Jumlah penduduk (000 org)	444,87	476,15	482,07	488,19	494,28

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

4.2 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga terhadap produk yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Pesawaran digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 13. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	9.349,29	9.325,11	9.780,52	10.816,88	11.978,48
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	5.167,52	5.029,77	5.324,66	5.702,62	6.156,14
Perbandingan Konsumsi RT terhadap PMTB	1,81	1,85	1,84	1,90	1,95

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB di Kabupaten Pesawaran, pada tahun 2019 sebesar 1,81 kemudian pada tahun berikutnya rasio tersebut mengalami peningkatan menjadi 1,85. Namun, pada tahun 2021 rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB mengalami sedikit penurunan. Perlambatan rasio di kasus ini lebih kearah peningkatan konsumsi lebih lambat dibandingkan peningkatan investasi. Pada tahun 2022 hingga 2023, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB di kabupaten Pesawaran mengalami peningkatan hingga mencapai 1,95.

4.3 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir, baik berasal dari produk domestik maupun impor, untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

**Tabel 14. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB
Kabupaten Pesawaran, 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	9.349,29	9.325,11	9.780,52	10.816,88	11.978,48
b. LNPRT	220,37	225,11	234,90	250,07	282,85
c. Pemerintah	1.125,38	1.119,81	1.141,64	1.103,13	1.146,73
Jumlah	10.695,05	10.670,03	11.157,05	12.170,08	13.408,07
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	16.208,21	16.211,74	16.814,58	18.601,24	20.217,38
Persentase	65,99	65,82	66,35	65,43	66,32

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 65 persen). Selain pada tahun 2020, konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB cenderung berfluktuatif. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) memiliki peran yang relatif kecil terhadap PDRB.

4.4 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

”**ICOR**” merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter “Nilai Tambah”.

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap

pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit.

Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Tabel 15. Incremental Capital Output Ratio Kabupaten Pesawaran 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (miliar Rp)	11.402,09	11.258,77	11.493,29	12.016,35	12.555,57
Perubahan (miliar Rp)	543,18	(143,32)	234,52	523,06	539,22
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	3.534,27	3.354,08	3.494,79	3.582,54	3.740,39
ICOR	6,51	(23,40)	14,90	6,85	6,94

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Data di atas menunjukkan besaran ICOR pada tahun 2019 mencapai 6,51. Artinya, pada tahun 2019, untuk meningkatkan satu satuan output PDRB diperlukan investasi sebesar 6,51 satuan. Kenyataan yang terjadi, Kabupaten Pesawaran masih sangat membutuhkan banyak investasi untuk mendongkrak perekonomian di Kabupaten Pesawaran. Kabupaten Pesawaran kaya akan potensi sumber daya alam. Namun, pemanfaatannya masih kurang optimal dikarenakan kurangnya investasi yang masuk di Kabupaten Pesawaran. Investasi di semua sektor seperti: pariwisata, angkutan dan pertanian selain mampu meningkatkan produksi juga dapat menyerap tenaga kerja.

Sedangkan ditahun 2020 nilai ICOR yang bertanda negatif 23,40 disebabkan oleh penurunan output yang terjadi di tahun tersebut. Meskipun di tahun 2020 masih terdapat investasi fisik, namun dikarenakan perekonomian yang lesu sebagai dampak dari pandemi Covid-19, mengakibatkan investasi fisik yang dilakukan belum mampu untuk menggerakkan output di Kabupaten Pesawaran.

Pada tahun 2021, seiring penurunan pandemi Covid-19, Kabupaten Pesawaran dapat kembali mengalami peningkatan yang cukup drastis nilai ICOR menjadi sebesar 14,60. Hal ini terjadi karena aktivitas ekonomi mulai kembali normal sehingga mampu mendongkrak roda perekonomian. Peningkatan tersebut juga terus terjadi sepanjang tahun 2022 hingga tahun 2023 walaupun mengalami sedikit perlambatan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Meningkatnya nilai ICOR sepanjang tahun 2022-2023 sejalan dengan meningkatnya beberapa investasi fisik pada fasilitas perdagangan, pariwisata, angkutan perjalanan yang mulai terjadi di Kabupaten Pesawaran.

<https://pesawarankab.bps.go.id>

PENUTUP

5



PENUTUP

1. PDRB Kabupaten Pesawaran menurut pengeluaran tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Pesawaran pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi, sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2019 sampai dengan 2023, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).

5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Pesawaran terhadap ekonomi luar daerah.

<https://pesawarankab.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://pesawararibbps.go.id>

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesawaran Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	9.349,29	9.325,11	9.780,52	10.816,88	11.978,48
2. Konsumsi LNPRT	220,37	225,11	234,90	250,07	282,85
3. Konsumsi Pemerintah	1.125,38	1.119,81	1.141,64	1.103,13	1.146,73
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.167,52	5.029,77	5.324,66	5.702,62	6.156,14
5. Perubahan Inventori	2,07	182,34	-245,34	5,49	31,87
6. Net Ekspor	343,57	329,60	578,21	723,05	621,30
PDRB	16.208,21	16.211,74	16.814,58	18.601,24	20.217,38

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesawaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2019- 2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	6.342,86	6.211,34	6.368,15	6.683,80	7.088,30
2. Konsumsi LNPRT	136,92	137,47	140,27	143,22	156,41
3. Konsumsi Pemerintah	716,08	698,71	704,98	669,68	678,73
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.534,27	3.354,08	3.494,79	3.582,54	3.740,39
5. Perubahan Inventori	1,76	160,33	-85,17	3,60	23,76
6. Net Ekspor	670,20	696,85	870,28	933,51	867,99
PDRB	11.402,09	11.258,77	11.493,29	12.016,35	12.555,57

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesawaran Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen), 2019–2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	57,68	57,52	58,17	58,15	59,25
2. Konsumsi LNPRT	1,36	1,39	1,40	1,34	1,40
3. Konsumsi Pemerintah	6,94	6,91	6,79	5,93	5,67
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,88	31,03	31,67	30,66	30,45
5. Perubahan Inventori	0,01	1,12	(1,46)	0,03	0,16
6. Net Ekspor	2,12	2,03	3,44	3,89	3,07
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Lampiran 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesawaran Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (persen), 2019–2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	55,63	55,17	55,41	55,62	56,46
2. Konsumsi LNPRT	1,20	1,22	1,22	1,19	1,25
3. Konsumsi Pemerintah	6,28	6,21	6,13	5,57	5,41
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,00	29,79	30,41	29,81	29,79
5. Perubahan Inventori	0,02	1,42	(0,74)	0,03	0,19
6. Net Ekspor	5,88	6,19	7,57	7,77	6,91
PDRB	100	100	100	100	100

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Lampiran 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesawaran Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen), 2019–2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	7,96	(0,26)	4,88	10,60	10,74
2. Konsumsi LNPRT	10,86	2,15	4,35	6,46	13,11
3. Konsumsi Pemerintah	4,71	(0,50)	1,95	(3,37)	3,95
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	9,81	(2,67)	5,86	7,10	7,95
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	7,34	0,02	3,72	10,63	8,69

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesawaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (persen), 2019–2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,04	(2,07)	2,52	4,96	6,05
2. Konsumsi LNPRT	9,29	0,40	2,04	2,11	9,20
3. Konsumsi Pemerintah	2,97	(2,43)	0,90	-5,01	1,35
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,70	(5,10)	4,20	2,51	4,41
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	5,00	(1,26)	2,08	4,55	4,49

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

**Lampiran 7. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Pesawaran Menurut Pengeluaran (2010=100),
2019–2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	147,40	150,13	153,58	161,84	168,99
2. Konsumsi LNPRT	160,96	163,75	167,46	174,60	180,85
3. Konsumsi Pemerintah	157,16	160,27	161,94	164,73	168,95
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	146,21	149,96	152,36	159,18	164,59
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	142,15	143,99	146,30	154,80	161,02

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Lampiran 8. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesawaran Menurut Pengeluaran (persen), 2019–2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,77	1,85	2,30	5,37	4,42
2. Konsumsi LNPRT	1,43	1,74	2,26	4,26	3,58
3. Konsumsi Pemerintah	1,68	1,98	1,04	1,72	2,57
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,89	2,56	1,60	4,48	3,40
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	2,23	1,30	1,60	5,81	4,02

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

DAFTAR PUSTAKA

<https://pesawaran.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
- _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
- _____, *Sistem Neraca Nasional*, Jakarta, 2008.
- _____, *Statistik Industri, berbagai seri*, Jakarta.
- _____, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
- _____, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
- _____, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
- _____, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
- _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
- _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta, 1999.
- Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
- Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
- Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
- United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.
- _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
- _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
- _____, *Link between Business Accounting and National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No.76, New York, 2000.
- Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
- Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.
- World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, Washington DC, 1993

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PESAWARAN**

Jln. Ahmad Yani No. 119, Gedong Tataan,
Pesawaran, Lampung. Telp. (0721) 94711,
website: <https://pesawarankab.bps.go.id>